



பிணங்குறுபுரம் பிணங்குறு

**PEMERINTAH
PROVINSI
BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://file.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025. Penyusunan LKjIP merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan. LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan serta mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan Pemerintah Provinsi Bali yang akuntabel.

Bali, 22 Juni 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Cascading.....	2
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi	3
1.2.2 Sumber Daya Manusia.....	4
1.2.3 Sarana dan Prasarana	4
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	5
1.3.1 Permasalahan Utama.....	6
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perencanaan Kinerja	9
2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2025	9
2.2.2 Instrumen Pendukung	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	13
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	13
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	24
3.4 Inovasi	35
3.4.1 Inkubator Bisnis	35
3.4.2 Arak Kultura	36
BAB IV	38
PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Langkah-Langkah Kedepan.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	40



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke depan yaitu :

1. Belum optimalnya pola kemitraan Koperasi dan UMKM
2. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Pelaku Usaha Mikro
3. Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan Pelaku UMKM
4. Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
5. Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2025, kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

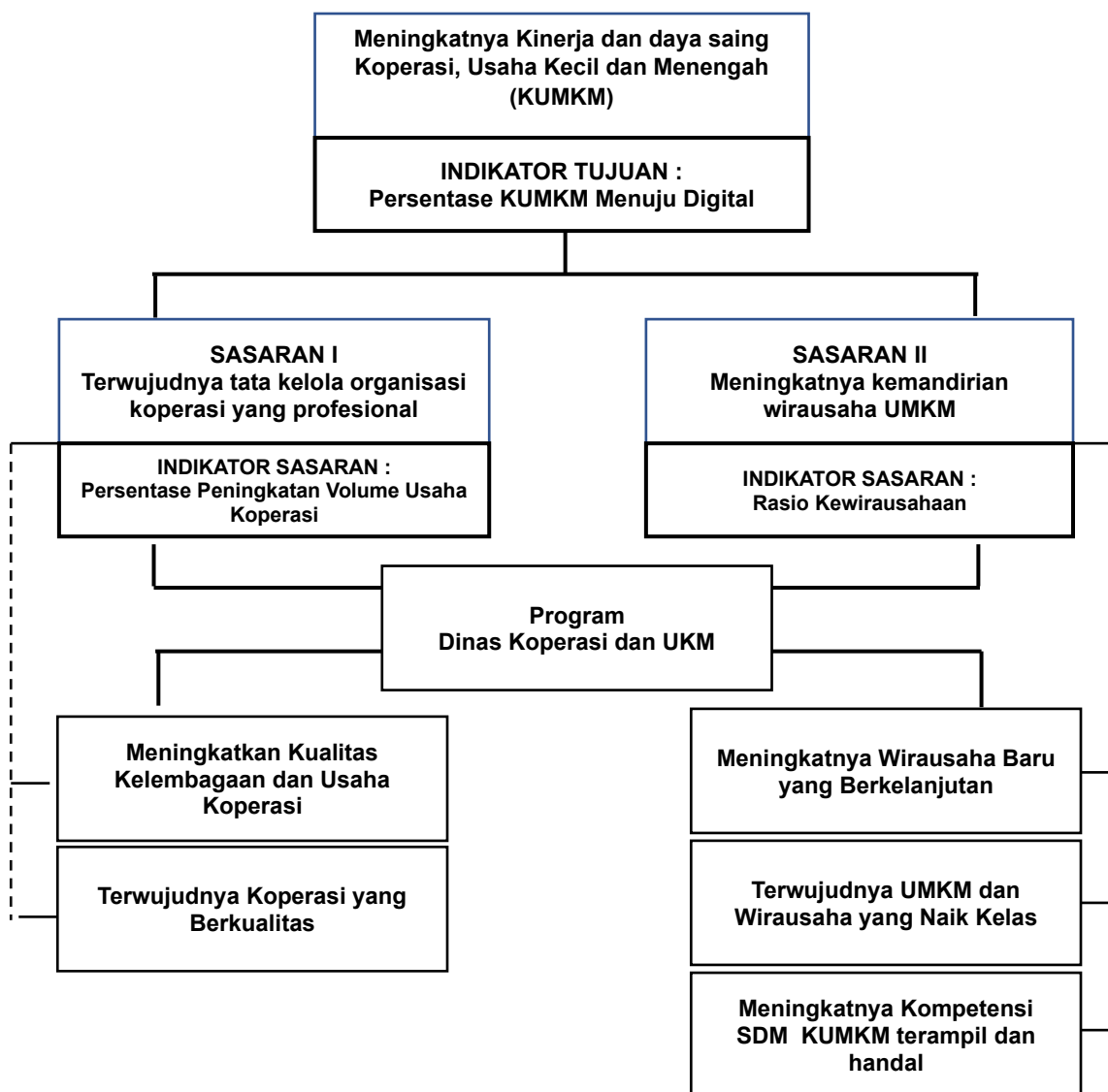
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kinerjanya



1.1.1 Cascading

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.



Gambar 1.1 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali



1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperas, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali



1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. Berikut ini jumlah pegawai, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan jenjang pendidikan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan XI (PPPK)	1
2	Golongan IX (PPPK)	1
3	Golongan VII (PPPK)	1
4	Golongan IV	11
5	Golongan III	38
6	Golongan II	6
7	Golongan I	-
Total		58

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2025)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	13
3	Strata 1	35
4	Diploma III	4
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	4
7	SLTP / Sederajat	1
8	SD	-
Total		58

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2025)

1.2.3 Sarana dan Prasarana

NO	GOLONGAN	TOTAL		KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	
1	Tanah	6.345	M ²	Sudah diserahkan
2	Bangunan Gedung	4	Unit	Kondisi Baik



3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	13	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	119	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	86	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	69	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2025)

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjalankan kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM pada tataran menengah mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja



terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran makro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

Ketahanan ekonomi sangat ditentukan oleh kekokohan dan kemandirian sektor Koperasi, dan UMKM. Untuk itu upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali harus terus dilaksanakan melalui pembangunan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha, kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM, untuk menjadikan Koperasi dan UMKM mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Daerah, penggerak perjuangan Ekonomi Rakyat, dan menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah pokok pembangunan, khususnya mengatasi masalah pengangguran, dan kemiskinan serta menjadi ketahanan ekonomi daerah.

1.3.1 Permasalahan Utama

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pola kemitraan Koperasi dan UMKM
- b. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Pelaku Usaha Mikro
- c. Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan Pelaku UMKM
- d. Rendahnya daya saing, produktifitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
- e. Belum terpetakannya data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan akuntabel



1.4 Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selama tahun 2025, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan;

Bab II Perencanaan menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

TUJUAN
MENINGKATKAN KINERJA DAN DAYA SAING KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SERTA WIRAUSAHA

Indikator:
Persentase Koperasi dan UMKM Digital



SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS DAN MODERN

INDIKATOR 1 : Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi



SASARAN 2 : TERWUJUDNYA UMKM DAN WIRAUSAHA YANG BERDAYA SAING DAN PRODUKTIF

INDIKATOR 2 : Rasio Kewirausahaan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN JANGKAUAN PEMASARAN



PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN



PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA MELALUI MODERNISASI USAHA



PENINGKATAN VALIDASI DATA KOPERASI DAN UMKM



PENINGKATAN KUPASITAS SDM KUMKM

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

- Sasaran 1 : Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern
Indikator : Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
- Sasaran 2 : Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif
Indikator : Rasio Kewirausahaan.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN	
				2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8%	8%
		Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3%	3,25%

2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra RPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Persentase	8,00%
		Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3,25%

2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 22.074.883.383 Dengan rincian : Belanja Pegawai Rp. 13.114.769.179, Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.951.116.204, Belanja Subsidi Rp. 9.000.000 dan Belanja Modal Rp. 955.055.300.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Tabel 2.3
Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025
Sebelum dan Sesudah Pergeseran Anggaran

NO	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi anggaran Tahun 2025	23.835.263.248	22.074.883.383
2	Belanja Pegawai	16.368.269.734	13.114.769.179
3	Belanja Barang dan Jasa	7.376.993.514	8.951.116.204
4	Belanja Subsidi	90.000.000	9.000.000
5	Belanja Modal	972.452.200	955.055.300

2.2.2 Instrumen Pendukung

1. Website Dinas

Instrument pendukung sistem informasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2025 telah dilengkapi dengan adanya Website Dinas. Dengan adanya Website tersebut diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat umumnya dan masyarakat Koperasi dan UMKM pada khususnya dapat mengetahui Keberadaan dan Tugas Fungsi Dinas dalam Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM, serta dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Dinas.

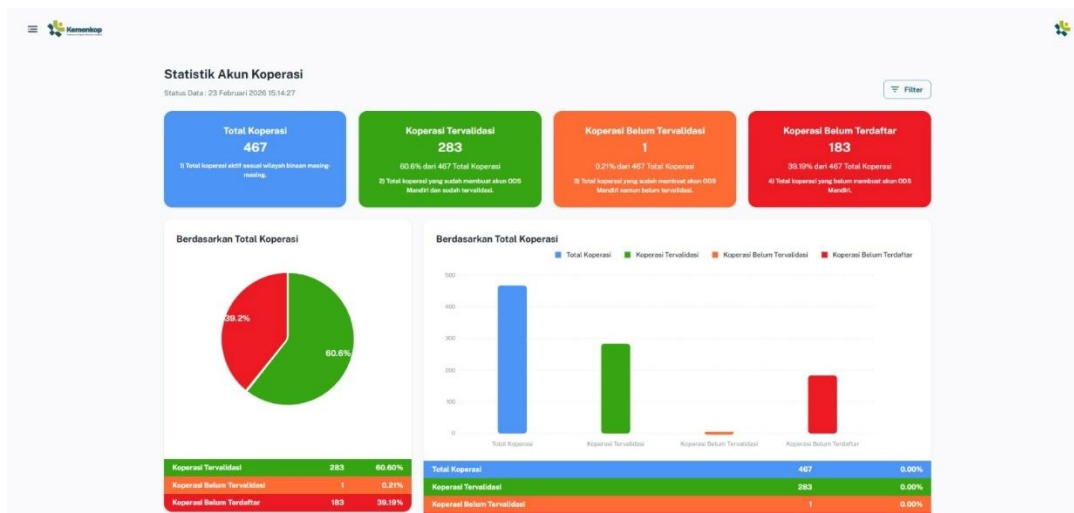


Gambar 2.1 Tampilan Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provisnsi Bali



2. Online Data Sistem (ODS Koperasi)

Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Online Data Sistem (ODS Koperasi). Online Data Sistem (ODS Koperasi) merupakan Aplikasi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang berkerja sama dengan Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Bali. Online Data Sistem (ODS Koperasi) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dataKoperasi. Aplikasi ODS juga mengelola proses Sistem pendataan yang dilakukan adalah mengkompilasi data Koperasi yang diperoleh dari kabupaten/kota.



Gambar 2.2 Tampilan ODS

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Bali guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Persentase
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	Persentase

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp. 22.074.883.383,00 (Dua puluh dua miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang menggunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
a.	Sangat Baik	$\geq 91\%$
b.	Baik	76 – 90,99%
c.	Cukup	66 – 75,99%
d.	Kurang	51 – 65,99%
e.	Sangat Kurang	$\leq$

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
a Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8,00%	19,61%	245%	8,00%	20,25%	253%
b Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,00%	3,66%	122%	3,25%	3,27%	101%

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sudah sangat baik.

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2025 “Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi” adalah 20,25% dari target sebesar 8% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 253%. Peningkatan volume usaha koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anggotanya. Semakin besar volume usaha yang dijalankan, semakin banyak pula manfaat yang bisa diperoleh oleh koperasi, seperti peningkatan pendapatan, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, serta memperluas jaringan usaha. Hal ini akan memperkuat posisi koperasi di pasar, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Dengan peningkatan volume usaha, koperasi juga dapat memperbesar cadangan modal yang bisa digunakan untuk pengembangan lebih lanjut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Untuk mencapai peningkatan volume usaha koperasi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, koperasi perlu memperluas jangkauan pasar dengan melakukan inovasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Kedua, koperasi harus mengoptimalkan manajemen dan sistem operasionalnya, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi dan komunikasi. Ketiga, koperasi bisa menjalin kemitraan strategis dengan pihak lain untuk memperbesar volume usaha. Selain itu, edukasi dan pelatihan kepada anggota koperasi juga sangat penting agar mereka lebih terampil dalam mengelola usaha dan dapat berkontribusi secara maksimal

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator Rasio Kewirausahaan, target tahun 2025 adalah 3,25% dengan realisasi 3,27% dengan



kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah :

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti marketplace, e-commerce atau platform digital lainnya.
3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Tabel 3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	N/A	8,00	8,00	N/A	19,61	20,25
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	2,9	3,00	3,25	3,50	3,66	3,27

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 5 (lima) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2025. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Data-data yang kosong merupakan bentuk penyesuaian indikator hasil *review* SAKIP, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian indikator kinerja pertahunnya.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (*off taker/buyer*), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.



- b. Peningkatan Volume Usaha Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan, Pemberdayaan Koperasi, Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha serta adanya program Prioritas Nasional yaitu Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
- c. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM.

Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	TARGET AKHIR 2026	CAPAIAN	Tingkat Kemajuan
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20,25	24,00	84%	Mendekati Target
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,27	3,5	93%	Mendekati Target

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2025 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2026. Dapat diketahuai bahwa Pencapaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi sudah mendekati target akhir Renstra dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berperan aktif dalam pemberdayaan koperasi dengan melaksanakan program-program pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota koperasi dalam manajemen usaha, pemasaran produk, serta pengelolaan keuangan. Pencapaian Indikator Rasio Kewirausahaan juga sudah melebihi target, capaian itu dicapai berkat langkah-langkah yang diambil antara lain menyediakan pelatihan kewirausahaan, memberikan akses kepada informasi dan teknologi terkini, serta memfasilitasi pertemuan antara calon pengusaha dengan investor atau mitra bisnis. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali juga mengembangkan program inkubasi bisnis dan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha serta akses pembiayaan yang terjangkau.



Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Daerah Provinsi Bali dengan Capaian Nasional

Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Capaian Nasional	Perbandingan
		Target	Realisasi	Capaian %		
a Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8,00%	20,25%	253%	8,12%	Jauh diatas Nasional
b Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,25%	3,27%	101%	3,29%	Selevel Nasional

- Secara nasional, pertumbuhan volume usaha koperasi aktif di Indonesia di Tahun 2024 adalah 8,12%. Capaian Bali untuk peningkatan volume usaha koperasi berada sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Ini menunjukkan pertumbuhan koperasi di Bali sangat kuat, didorong oleh pemulihan sektor pariwisata, UMKM lokal, dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.
- Rasio kewirausahaan nasional Indonesia saat ini adalah 3,29% dari total populasi di Tahun 2025. Dari tabel diatas dapat disimpulkan ekosistem kewirausahaan Bali cukup kompetitif, terutama pada sektor ekonomi kreatif, perdagangan, kuliner, dan usaha berbasis pariwisata.

Tabel 3.7 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	8,00	20,25	253%	Peningkatan Peningkatan volume usaha Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, fasilitasi dalam hal perizinan, pembiayaan, serta pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam hal manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan	Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, koperasi akan lebih mampu mengelola usaha mereka dengan baik dan meningkatkan volume usaha



b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,25	3,27	101%	Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM	
----------	--	---------------------	------	------	------	--	--

Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	8,00	20,25	253%	964.909.804	907.944.163	94	6%
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	3,25	3,27	101%	5.171.195.217	4.675.790.047	90	10%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	253	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	100%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	17 Unit	Menunjang



			Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	17 Unit	Menunjang
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	6 Unit	Menunjang
			Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	6 Unit	Menunjang
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	107 Unit	Menunjang



			Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	107 Unit	Menunjang
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	100 Unit	Menunjang
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit	Menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	100%	Menunjang
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	164 Kop	Menunjang



				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	84 Kop	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	80 Kop	Menunjang
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	120	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	100%	Menunjang
				<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	710 Org	Menunjang
				Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	710 Org	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	100%	Menunjang



				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 UMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 UMKM	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	100%	Menunjang
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	200 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	110 Unit	Menunjang



				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	90 Unit	
--	--	--	--	---	---	---------	--

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus dikelola secara efisien dan produktif. Tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi kecil menjadi entitas yang lebih besar.

Indikator program (sesuai dengan RENSTRA RPD 2024-2026) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah :

1. Persentase Koperasi yang difasilitasi IUSP. Target kinerja ini di tahun 2025 adalah 3,00% dengan Capaian 100%
2. Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta. Target kinerja ini di tahun 2025 adalah 3,2% dengan capaian 100%
3. Persentase Koperasi Berkualitas. Target kinerja ini tahun 2025 adalah 7,00% dengan realisasi 100%

b. Rasio Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran



melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2025 target 3,25% dengan capaiannya adalah 101% dan termasuk pada kategori Baik. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA RPD 2024-2026) yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah :

1. Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi. Target kinerja ini di tahun 2025 adalah 25% dengan capaian 100%
2. Persentase pertumbuhan wirausaha. Target kinerja ini di tahun 2025 adalah 6,00% dengan capaian 100%
3. Persentase UMKM Naik Kelas. Target Kinerja ini di tahun 2025 adalah 3,00% dengan capaian 100%

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2025, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 22.074.883.383,- dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.8 Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori	
						Uraian	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Indokator Kinerja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Terwujud nya Koperasi yang Berkualita s dan Modern	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	8,00 %	20,25%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Rp. 779.890.289	Rp 742.362.289	95,19	4,81	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori
						Uraian	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 9.919.600	Rp 9.592.000	96,7	3,3	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori	
						Uraian	Indikator Kinerja		Uraian Kegiatan	Indokator Kinerja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Rp 61.553.210	Rp 55.462.310	90,1	9,9	Sangat Efisien
									Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Rp 26.149.600	Rp 25.552.299	97,72	2,28	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori
						Uraian	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaa n Koperasi	Rp 26.908.000	Rp 25.051.560	93,1	6,9	Efisien
						- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 satu Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaa n dan Pengawasa n	Rp 50.489.105	Rp 49.923.705	98,88	1,12	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori
						Uraian	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Indokator Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Terwujud nya UMKM dan Wirausah a yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio kewirausahaan	3,25 %	3,27%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahua n perkoperasi an	Rp4.399.123.302	Rp4.006.274.894	91,07	8,93	Sangat Efisien
					Program Pengemban gan UMKM	- Pengembang an Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	- Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatka n Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp 367.888.094	Rp 287.939.844	78,27	21,73	Sangat Efisien
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Rp 50.000.000	Rp 48.031.977	96,06	3,94	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori	
						Uraian		Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan							Indokator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15
										Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	Rp 97.119.700	Rp 54.261.768	55,87	44,13	Sangat Efisien
										Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Rp 46.160.000	Rp 24.246.278	52,53	47,47	Sangat Efisien
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp 338.343.821	Rp 326.750.299	96,57	3,43	Efisien



N O	Sasaran Strategis	Indikator	Targ et	Realis asi	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capai an (%)	Efisie nsi (%)	Katag ori
						Uraian		Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
									Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Rp 65.840.000	Rp 54.825.010	83,27	16,73	Sangat Efisien

Analisis efisinsi penggunaan sumber daya keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hampir seluruh kegiatan berada dalam kategori sangat efisien. Efisiensi anggaran berkisar antara 1,12% sampai 47,47% dan tidak terdapat pemborosan anggaran signifikan. Terdapat efisiensi anggaran yang cukup tinggi di beberapa sub kegiatan dikarenakan terdapat rasionalisasi anggaran, walaupun demikian pencapaian kinerja dan target program, kegiatan dan sub kegiatan tetap terpenuhi dikarenakan kolaborasi dan elaborasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali bersama stakeholder dari Instansi Vertikal, Akademisi, dan beberapa komunitas.



**Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dan Pendukung
Tahun 2025**

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	789.809.889	751.954.289	95,21
a	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	779.890.289	742.362.289	95,19
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	779.890.289	742.362.289	95,19
b	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600	9.592.000	96,70
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600	9.592.000	96,70
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.397.105	74.975.265	96,87
a	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.908.000	25.051.560	93,10
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26.908.000	25.051.560	93,10
b	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.489.105	49.923.705	98,88
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.489.105	49.923.705	98,88
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	97.702.810	81.014.609	82,92
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	97.702.810	81.014.609	82,92
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	61.553.210	55.462.310	90,10
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.149.600	25.552.299	97,72
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	404.183.821	381.575.309	94,41
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	404.183.821	381.575.309	94,41
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	338.343.821	326.750.299	96,57



	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	65.840.000	54.825.010	83,27
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	367.888.094	287.939.844	78,27
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	367.888.094	287.939.844	78,27
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	367.888.094	287.939.844	78,27
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000	48.031.977	96,06
	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	46.160.000	24.246.278	52,53
	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	97.119.700	54.261.768	55,87
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.399.123.302	4.006.274.894	91,07
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.399.123.302	4.006.274.894	91,07
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4.399.123.302	4.006.274.894	91,07
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.426.026.668	15.171.606.396	92,36
a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.935.025	1.198.499.629	91,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.476.657	707.253.857	89,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.920.000	33.605.250	67,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.538.368	457.640.522,61	97,47
b	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.608.802	91.485.732	82,71
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.343.902	84.564.932	82,63
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.264.900	6.920.800	83,74
c	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.165.169.179	12.207.439.336	92,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.165.169.179	12.207.439.336	92,73
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.047.794	173.561.316	82,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.573.000	33.821.696	68,23



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.800	9.901.200	90,03
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.405.800	36.311.500	75,01
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.071.194	75.400.000	99,12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000	14.501.920	67,45
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	3.625.000	80,56
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	683.055.300	629.293.989	92,13
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	683.055.300	629.293.989	92,13
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.210.568	871.326.394	91,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.900	1.270.000	63,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000	178.603.990	72,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.216.668	691.452.404	98,75

Realisasi anggaran pada tahun 2025 pada 7 program tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sudah BAIK.



3.4 Inovasi

3.4.1 Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis adalah program yang dirancang untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha rintisan baru. Inkubator bisnis dapat Mendorong Inovasi dan mendukung pengembangan produk selain itu inkubator bisnis ingin membangun ekosistem Startup. Inkubator bisnis berperan dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup. Mereka menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan mendorong interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk wirausahawan, investor, industri, akademisi, dan pemerintah. Melalui jaringan ini, inkubator bisnis membantu dalam pertukaran pengetahuan, berbagi sumber daya, dan menciptakan peluang bisnis yang saling menguntungkan. Inkubator BEC adalah inkubator bisnis yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

BEC adalah singkatan dari *Bali Entrepreneur Collaborator*. Inkubator BEC bertujuan untuk memfasilitas dan memberikan dukungan bagi pengusaha muda dan startup di Bali dalam memulai, mengembangkan, dan mengelola bisnis mereka. Inkubator BEC memberikan berbagai layanan seperti pelatihan, bimbingan teknis, akses ke modal usaha, dan koneksi dengan jaringan bisnis dan investor. Selain itu, Inkubator BEC juga membantu pengusaha muda dan startup dalam mengembangkan produk atau jasa baru yang inovatif dan berdaya saing. Prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan sukarela, dan pengelolaan yang demokratis juga diterapkan dalam Inkubator BEC.

Bali Entrepreneur Collaborator menawarkan program pendampingan dan mentoring yang didesain untuk membimbing wirausahawan melalui fase awal pengembangan bisnis mereka. Para mentor yang berpengalaman dapat memberikan saran berharga, berbagi pengetahuan mereka, dan membantu menghindari kesalahan umum yang dapat merugikan startup. Fokus terakhir terhadap pelatihan dan mengadakan program pendidikan yang membantu meningkatkan keterampilan wirausahawan dan pengelola Koperasi.





Gambar 4.1 Kegiatan Lembaga Inkubasi BEC Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bali

3.4.2 Arak Kultura

Seiring dengan ditetapkannya arak Bali sebagai produk lokal yang legal dan dilindungi oleh regulasi, khususnya melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, Pemerintah Provinsi Bali memberikan ruang yang jelas bagi pengelolaan, produksi, dan pengembangan arak Bali secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong penguatan ekosistem usaha arak Bali yang legal, berkelanjutan, serta berorientasi pada perlindungan budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengembangan arak Bali tidak hanya menitikberatkan pada aspek produksi semata, melainkan juga membutuhkan inovasi dalam model bisnis, pengemasan, pemasaran, serta penguatan nilai tambah produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Diperlukan peran wirausahawan dan pelaku UMKM yang adaptif dan kreatif dalam mengemas arak Bali sebagai produk budaya yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Melalui kegiatan Lomba Start-Up UMKM dengan tema “Arakultura”, Pemerintah Provinsi Bali mendorong lahirnya usaha rintisan berbasis arak Bali yang inovatif, legal, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menjaring ide usaha kreatif sekaligus



memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah, selaras dengan pengembangan inkubator bisnis dan visi pembangunan ekonomi Bali yang berlandaskan budaya, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 4.5 Kegiatan Lembaga Inkubasi BEC Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bali



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 (Dua) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis RPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan para stakeholder Koperasi, UKM.
2. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025 semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

4.2 Langkang-Langkah Kedepan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi



- pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Pemanfaat teknologi informasi dalam memberikan penyuluhan, pendataan, aktivasi koperasi tidak aktif, serta pendampingan ijin usaha.
 3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
 4. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 16 Juni 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER


TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH
NIP. 19690510 199603 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	8,00%
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Rasio Kewirausahaan	3,50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	256.122.594	APBD
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	93.674.810	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	120.258.220	APBD
4	Program pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.553.310.416	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	537.661.002	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	400.443.504	APBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.417.119.902	Program Pendukung Kesekretariatan

Bali, 16 Juni 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI**

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI


WAYAN KOSTER


TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH
NIP. 19690510 199603 1 007



DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	1. Persentase KUMKM Menuju Digital	$\frac{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM On Board}}{\text{Keseluruhan data Koperasi dan UMKM}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Stakeholder Terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali	
a	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	1. Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	$\frac{\text{Volume Usaha Tahun ke n} - \text{Volume Usaha Tahun ke n-1}}{\text{Volume Usaha Tahun ke n-1}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pengawasan Koperasi dan UPTD DIKLAT KUMKM	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pengawasan Koperasi dan UPTD DIKLAT KUMKM	
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing	1. Rasio kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja di Bali}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan UKM, Bidang Kewirausahaan dan UPTD DIKLAT KUMKM	Bidang Pemberdayaan UKM, Bidang Kewirausahaan dan UPTD DIKLAT KUMKM	

